

Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari: Direktorat Jenderal Pajak (no-reply@pajak.go.id)

Kepada: suriana_bali@yahoo.com

Tanggal: Jumat, 6 Februari 2026 pukul 14.01 GMT+8



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 informasi@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-14733/CT/KPP.1410/2026
Tanggal	: 06 Februari 2026
NPWP	: 6408041805910005
Nama Wajib Pajak	: PUTU SURIANA
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 06 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Monon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebaran, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA**

NOMOR : 02/1828537

Pembetulan Ke Pembatalan

1721 - A2

MASA PEROLEHAN

0 1 - 1 2

TAHUN PEROLEHAN

2 0 2 5

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP : 719443590722000
A.2 NIP/ NRP : 199105182020121003
A.3 NAMA : PUTU SURIANA, A.Md
A.4 PANGKAT/ GOL : II/d / Pengatur Tk.I
A.5 NAMA JABATAN : Jurusita Pengganti Tk.Pertama Kelas IA / Kelas ITUN
A.6 JENIS KELAMIN : LAKI - LAKI PEREMPUAN
A.7 NIK : 6408041805910005
A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K / 2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI POKOK / PENSUEN	38.595.200
2.	TUNJANGAN ISTRI	3.859.520
3.	TUNJANGAN ANAK	1.323.264
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	2.820.000
6.	TUNJANGAN BERAS	3.765.840
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	540.758
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI	42.870.724
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)	93.775.306
PENGURANG		
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUEN	4.688.765
11.	IURAN PENSUEN ATAU IURAN THT	1.793.757
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	6.482.522
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	87.292.784
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	87.292.784
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67.500.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	19.792.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	989.600
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	989.600
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	989.600
23a.	PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
23b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	989.600
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	0
24a.	PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
24b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN C.03 BARU C.04 PENSUEN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 001035195025000
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
D.3 ID Sub Unit Organisasi : 663157
D.4 Tanggal : 3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 5 yyyy
D.5 NAMA PENANDATANGAN : HARMINI
D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah